



## PRAKTIK, KEPERCAYAAN, DAN NILAI INTERNASIONAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN NIRLABA: ALASAN DAN HAMBATAN PROSES HARMONISASI

Rahman Budianto

Email: rahmanbudianto99@gmail.com

### ABSTRAK

*Laporan keuangan adalah salah satu hal yang perlu dibuat oleh sebuah organisasi. Begitu juga organisasi nirlaba, namun organisasi nirlaba memiliki cara tersendiri untuk menyajikan laporan keuangan. Maka perlu proses harmonisasi pelaporan keuangan nirlaba. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja alasan yang mengharuskan organisasi nirlaba melakukan proses harmonisasi, selain itu artikel ini juga menjelaskan tentang hambatan apa saja yang memperlambat proses harmonisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menjabarkan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harmonisasi pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba penting untuk memenuhi kebutuhan pihak yang memberikan sumber daya dan menyajikan informasi yang relevan tentang aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas. Namun, perbedaan tujuan organisasi menyebabkan perbedaan dalam penggunaan dan isi laporan keuangan. Harmonisasi menghadapi hambatan seperti perbedaan standar akuntansi, masalah keuangan, dan budaya organisasi. Adapaun hambatan proses harmonisasi dikarenakan Organisasi nirlaba, termasuk sekolah, organisasi dengan nilai budaya Tri Hita Karana, dan masjid, kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan pemahaman tentang standar akuntansi. Sebagai contoh, Masjid di kota Banda belum menerapkan PSAK 45 karena kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan waktu yang terbatas.*

### LATAR BELAKANG

Penelitian mengenai laporan keuangan nirlaba sudah cukup banyak diteliti, namun pembahasan terkait alasan dan hambatan pada proses harmonisasi pelaporan keuangan nirlaba masih cukup jarang dilakukan. Beberapa penelitian tentang laporan keuangan nirlaba serta proses harmonisasinya dilakukan di Indonesia.

(Shoimah, Wardayati, and Sayekti 2021) dalam penelitian mereka yang berjudul “Adaptasi Laporan Keuangan pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo) bertujuan untuk menganalisis serta menyesuaikan pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan Isak 35. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa adanya perubahan metode pencatatan pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, namun masih mengadaptasi dari Isak 35.

Kemudian (Tinungki and Pusung 2014) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Panti tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panti Sosial dalam membuat laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No. 45. Laporan yang mereka buat hanya sebatas pengetahuan mereka saja.

Selanjutnya, salah satu penelitian yang berjudul “Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)” oleh (Tinungki and Pusung 2014) menjelaskan bahwa masjid adalah salah satu organisasi nirlaba dari segi keagamaan yang diharuskan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45. Dalam karya tulis tersebut juga dijelaskan bentuk dan jenis-jenis laporan keuangan nirlaba yang sesuai dengan PSAK No. 45.

Beberapa penelitian sebelumnya dapat menjelaskan kepada kita semua bahwa Lembaga atau organisasi nirlaba juga perlu membuat laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu dari beberapa penelitian sebelumnya juga dapat memberikan kita informasi bahwa beberapa organisasi nirlaba belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 atau ISAK 35 (pembaruan PSAK No. 45). Hal tersebut membuat organisasi nirlaba yang ada di Indonesia tidak selaras satu sama lain.

Berangkat dari masalah-masalah yang terjadi sebelumnya, organisasi-organisasi nirlaba yang ada di Indonesia perlu melakukan harmonisasi dalam melakukan pelaporan keuangannya. Agar semua organisasi nirlaba memiliki bentuk laporan keuangan yang sama. Harmonisasi yang dilakukan bukan hanya skala nasional saja namun juga perlu dilakukan harmonisasi laporan keuangan secara internasional.

Artikel ini bertujuan untuk menemukan alasan yang kemudian melatarbelakangi mengapa perlu dilakukannya proses harmonisasi pelaporan keuangan pada entitas atau organisasi nirlaba. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh organisasi nirlaba dalam melaksanakan proses harmonisasi pelaporan keuangan.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Organisasi Nirlaba**

Organisasi yang didirikan dengan bertujuan tidak hanya untuk mencari profit disebut dengan organisasi nirlaba, selain itu organisasi ini justru bermaksud mendukung hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Organisasi ini adalah salah satu entitas yang sumber modal operasioanalnya dari pihak penyumbang atau para dermawan yang memberikan asset yang dimilikinya tanpa mengharapkan pengembalian. Tujuan utamanya juga berdasarkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sumber dayanya tidak boleh diakui oleh pihak manapun. (Kristiani and Ardian 2022)

Beberapa contoh organsasi nirlaba adalah: VHWO, sekolah tinggi, universitas, dan beberapa organisasi nirlaba lainnya (masjid, panti, museum, gereja, organisasi massa dan masih banyak lagi). Berikut adalah ciri atau karakteristik dari organisasi nirlaba (Andarsari 2016):

1. Kepentingan organisasi tidak berhubungan dengan para pemberi dana
2. Organisasi nirlaba memperoleh dana kontribusi yang tidak diharapkan pengembalianannya oleh pemberi dana
3. Laba bukanlah orientasi bagi organisasi nirlaba, melainkan bertujuan untuk menghasilkan jasa atau barang

### **Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba**

Berikut adalah komponen laporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan Isak 35 (Shoimah, Wardayati, and Sayekti 2021) :

#### **1. Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan nirlaba yang berisi informasi yang berhubungan dengan aktiva, kewajiban dan juga aktiva bersih. Terdapat dua format dalam laporan posisi keuangan, yang pertama menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara menyendiri dibagian asset neto. Yang kedua, pos penghasilan komprehensif lain tidak disajikan dengan cara menyendiri.

#### **2. Laporan Penghasilan Komprehensif**

Laporan penghasilan komprehensif lain menyediakan informasi yang berhubungan dengan jumlah surplus ataupun deficit serta penghasilan komprehensif lain.

#### **3. Laporan Perubahan Aset Neto**

#### **4. Laporan Arus Kas**

Laporan ini menyediakan informasi keuangan berupa perubahan yang berhubungan dengan kas dan juga setara kas yang dikelompokan dalam

beberapa aktifitas yaitu operasi, investasi serta pendanaan dalam jangka waktu satu periode.

#### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan hal-hal yang tidak tercantum atau belum disajikan dalam laporan keuangan yang lainnya.

#### **Harmonisasi Akuntansi**

Harmonisasi akuntansi sangat berhubungan dengan yang dinamakan adopsi. Artinya dengan melakukan harmonisasi kita akan melakukan adopsi terhadap sesuatu hal namun lebih fleksibel dan terbuka. Dalam standar akuntansi keuangan, Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional dengan tujuan melakukan harmonisasi atau penyesuaian dalam pembuatan laporan keuangannya. Standar akuntansi internasional yang diadopsi adalah *International Financial Reporting Standard (IFRS)* yang tentunya tidak mudah untuk dilakukan oleh beberapa negara (Sugiarti 2016).

Beberapa hal atau faktor-faktor yang mengakibatkan perlunya dilakukan harmonisasi akuntansi adalah sebagai berikut (Maryono 2020):

##### 1. Sumber Pendanaan

Negara-negara dengan pasar ekuitas kuat seperti AS dan Inggris memiliki akuntansi yang fokus pada kinerja perusahaan dan membantu investor menganalisis arus kas dan risiko masa depan dengan pengungkapan informasi yang lengkap. Di sistem kredit berbasis bank seperti Swiss dan Jepang, akuntansi fokus pada perlindungan kreditur melalui pengukuran akuntansi yang konservatif karena bank memiliki akses langsung terhadap informasi yang dibutuhkan. Perusahaan kecil yang hanya bergantung pada pemiliknya tidak terikat dengan kreditur atau investor, sementara perusahaan besar yang memerlukan pendanaan dari eksternal sudah terikat dengan kepentingan kreditur atau investor ketika ada perubahan sumber pendanaan.

##### 2. Sistem Hukum

Ada dua orientasi dasar dalam dunia barat, yaitu hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). Di negara-negara dengan hukum kode, aturan akuntansi termasuk dalam hukum nasional dan umumnya sangat rinci serta mencakup banyak prosedur. Sementara itu, di negara-negara dengan hukum umum, aturan akuntansi ditetapkan oleh organisasi profesional sektor swasta, yang memungkinkan aturan tersebut menjadi lebih fleksibel dan inovatif.

### 3. Perpajakan

Perusahaan di banyak negara harus mengikuti standar akuntansi yang ditentukan oleh peraturan pajak karena pendapatan dan beban harus dicatat dalam akun mereka untuk keperluan pajak. Namun, di beberapa negara seperti Belanda, perbedaan antara akuntansi keuangan dan pajak terjadi, dan perusahaan harus menyesuaikan dengan hukum pajak jika terjadi perbedaan. Sebagai contoh, di Indonesia, ketentuan perpajakan hanya memperbolehkan metode FIFO dan rata-rata untuk mencatat persediaan.

### 4. Ikatan Politik dan Ekonomi

Ide dan teknologi akuntansi menyebar melalui beberapa cara, termasuk melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan lainnya. Sistem pencatatan berpasangan atau double entry berasal dari Italia pada tahun 1400an dan menyebar di seluruh Eropa bersamaan dengan gagasan pembaharuan lainnya. Negara-negara seperti Inggris dan Jerman mengeksport akuntansi ke negara-negara yang menjadi kekuasaannya, sementara Amerika Serikat memperkenalkan praktek akuntansi bergaya Amerika di Jepang. Negara-negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain, sementara negara lainnya memilih sistem akuntansi mereka sendiri. Oleh karena itu, perkembangan sistem akuntansi di suatu negara sangat tergantung pada hubungan politik atau ekonomi mereka dengan negara lain.

### 5. Inflasi

Inflasi mempengaruhi akuntansi biaya historis dan kecenderungan negara untuk menerapkan perubahan harga pada akun perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disampaikan pada saat inflasi dapat menyesatkan pihak yang berkepentingan karena biaya dicatat terlalu rendah, sehingga laba rugi tidak mencerminkan perubahan kepemilikan aktiva yang semestinya.

### 6. Tingkat Perkembangan Ekonomi

Sektor ekonomi yang berkembang di suatu negara mendorong inovasi dalam bertransaksi, investasi, dan sistem pembayaran. Hal ini menyebabkan beberapa masalah akuntansi, seperti penilaian aktiva tetap dan depresiasi, menjadi kurang relevan di sektor manufaktur. Seiring dengan perkembangan ini, tantangan akuntansi baru seperti penilaian aset tak berwujud dan manajemen sumber daya manusia semakin berkembang.

### 7. Tingkat Pendidikan

Akuntansi yang rumit hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi, dan informasi akuntansi yang kompleks hanya berguna bagi orang yang bisa memahaminya. Oleh karena itu, di masyarakat yang mayoritas berpendidikan rendah, akuntansi yang sederhana lebih bermanfaat daripada yang rumit dan kompleks.

#### 8. Budaya

Hofstede dalam Choi dan Meek menjelaskan bahwa budaya dapat dijelaskan melalui empat dimensi: individualisme vs kolektivisme, jarak kekuasaan besar vs kecil, penghindaran ketidakpastian kuat vs lemah, dan maskulinitas yang membedakan pria dan wanita. Dimensi tersebut berpengaruh terhadap sistem dan praktik akuntansi di suatu negara.

Selain faktor yang mempengaruhi, terdapat beberapa manfaat dalam melakukan harmonisasi standar akuntansi, yaitu (Yanti et al. 2020):

1. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK).
2. Upaya tersebut juga bertujuan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan SAK.
3. Selain itu, upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas dan manfaat laporan keuangan.
4. Tujuannya juga untuk meningkatkan kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari berbagai perusahaan.
5. Selain itu, upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan.
6. Upaya tersebut juga bertujuan untuk menurunkan biaya modal dengan cara membuka peluang pengumpulan dana melalui pasar modal.
7. Tujuannya juga untuk meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan.

## **METODE**

Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Data yang diambil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah dengan cara studi pustaka, yaitu mencari jurnal-jurnal terkait dan buku-buku terkait. Setelah data yang diperlukan sudah didapatkan semua, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Akhirnya dilakukan penyusunan hasil penelitian dengan cara penyajian deskriptif atau menjelaskan praktik,

kepercayaan, dan nilai internasional dalam pelaporan keuangan nirlaba: alasan dan hambatan proses harmonisasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik dalam Pelaporan Keuangan Nirlaba**

Lembaga zakat dalam pembuatan laporan keuangan menggunakan satandar yang telah ditetapkan oleh IAI melalui PSAK 45 yang kemudian saat ini dirubah menjadi ISAK 35. Lembaga zakat di Indonesia juga melakukan pelaporan penggunaan atau realisasinya dalam website Lembaga zakat masing-masing. Sebanyak 79 lembaga zakat di Indonesia, 78% diantaranya memiliki alamat website. Hal ini dilakukan karena Lembaga zakat telah menyadari bahwa kemajuan teknologi saat ini sangat dibutuhkan dalam melakukan pembagian atau publikasian informasi laporan keuangan. Namun, yang masih menjadi masalah adalah dari 79 lembaga zakat yang telah memiliki website, tidak semuanya melakukan pelaporan keuangannya melalui website. Hal ini yang kemudian disebabkan terjadi dua kemungkinan besar yaitu, pertama Lembaga zakat tersebut tidak mempunyai laporan keuangan, atau kedua Lembaga tersebut mempunyai laporan keuangan namun tidak ingin mempublikasikan pada website yang mereka miliki. Kedua alasan tersebut dapat menjelaskan kepada kita bahwa Lembaga zakat di Indonesia masih kekurangan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Lebih lanjut, diketahui hanya sekitar 24% yang Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK serta hanya sekitar 17% Lembaga zakat yang telah dilakukan audit. Lembaga zakat yang telah dilakukan audit mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. (Andriani, Mahyuni, and Nurhidayati 2021)

Kemudian, Yayasan Pendidikan Dian Cipta Cendikia dalam melakukan praktik serta pelaporan keuangannya menggunakan aplikasi Sango Accounting. Di mana aplikasi ini adalah sebuah aplikasi penyajian laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan organisasi nirlaba yang berlaku di Indonesia. Aplikasi Sango Accounting ini tidak dapat digunakan pada organsasi yang berorientasi mencari laba dikarenakan struktur dalam aplikasi ini dikhususkan digunakan oleh organisasi nirlaba. Yayasan Pendidikan ini, setelah menggunakan aplikasi Sango Accounting dalam melakukan penyajian laporan keuangan menjadi ebih tepat waktu. Serta data yang disajikan adalah yang benar-benar terjadi karena aplikasi ini saling berintegrasi antara accounting dan juga kasir. Adapun Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun

laporan keuangan pada aplikasi Sango Accounting yaitu: 1) Membuat Kode Rekening; 2) Membuat Jurnal Transaksi yang Terjadi (mencatat penerimaan kas dan pencatatan pengeluaran kas; 3) Membuat Buku Besar; 4) Menyusun Laporan Keuangan (laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas). (Sartika 2019)

Masjid juga merupakan salah satu bentuk dari organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan. Masjid di kota Banda dalam melakukan praktik pelaporan keuangan ditemukan bahwa mereka telah melakukan pencatatan transaksi dan membuat laporan keuangan secara rutin yang tentunya dilengkapi dengan bukti-bukti. Laporan keuangan yang dibuat oleh masjid-masjid di kota Banda kemudian telah disampaikan secara transparan melalui print out serta papan informasi masjid masing-masing. Namun, yang masih menjadi kendala adalah masjid-masjid di kota Banda masih belum menggunakan format penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akutansi yang berlaku. Laporan keuangan yang ditempelkan pada papan pengumuman masjid berisi sumber dana serta penggunaan dana tersebut setiap bulannya. Laporan keuangan yang dibuat masih sangat sederhana hanya berisi pengeluaran, penerimaan, serta saldo akhir yang dimiliki oleh masjid. (Nazila and Fahlevi 2019)

### **Kepercayaan dalam Pelaporan Keuangan Nirlaba**

Kepercayaan adalah keinginan seseorang untuk mempercayai orang lain dengan keyakinan yang lebih. Dalam konteks sosial, tingkat kepercayaan seseorang terhadap orang lain akan berdampak pada proses pengambilan keputusan, di mana seseorang akan lebih memilih opsi dari orang yang ia percayai daripada dari orang yang ia kurang percayai. Kepercayaan donatur terhadap yayasan diartikan sebagai tingkat keyakinan bahwa donatur telah menyumbangkan sumber dayanya dengan tepat, yang akan menguntungkan bagi donatur itu sendiri dan bagi yayasan dalam mencapai tujuannya. Beberapa hal kemudian dijelaskan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan kepercayaan donatur pada Yayasan Sosial Keagamaan Cangkir Yadufa, yaitu (Maulidiyah and Darno 2019):

1. Kepercayaan donatur pada Yayasan Sosial Keagamaan Cangkir Yadufa tidak dipengaruhi oleh transparansi laporan keuangan
2. Kepercayaan donatur pada Cangkir Yadufa tidak dipengaruhi oleh akuntabilitas laporan keuangan

3. Kepercayaan donatur pada Yayasan Cangkir Yadufa dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi secara simultan
4. Ada hubungan parsial antara transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan kepercayaan donatur
5. Secara bersamaan, terdapat hubungan yang kuat antara transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur
6. Mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi tingkat kepercayaan para donatur terhadap Yayasan Sosial Keagamaan Cangkir Yadufa di masa depan

Selanjutnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mempertahankan kepercayaan dari *muzakki* terkait akuntabel, profesional dan transparannya laporan keuangan yang telah dibuat, perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan para *muzakki* terhadap organisasi pengelola zakat. Faktor-faktor tersebut adalah (Ardini and Asrori 2020):

1. Literasi Amil

Artinya adalah setiap muslim harus memahami dengan benar kedudukan zakat dalam Islam. Di mana zakat merupakan salah satu pilar dari rukun Islam yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim. Selain itu mereka harus paham bahwa zakat berfungsi untuk menyucikan harta para umat Islam.

2. Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat

Artinya adalah sebuah Organisasi Pengelola Zakat wajib melaporkan keuangan dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan apa yang terjadi. Organisasi Pengelola Zakat selain bertanggungjawab penuh kepada para *muzakki* juga bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dengan begitu ketika organisasi pengelola zakat mampu memberikan laporan pertanggungjawaban secara jujur, dengan otomatis para pemangku kepentingan atau stakeholder akan memberikan kepercayaan yang penuh.

3. Transparansi Pelaporan Keuangan

Artinya adalah para pengelola zakat harus memberikan pelayanan yang transparan agar dipercayakan oleh *muzakki*. Entitas yang tidak transparan akan dianggap negative oleh pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan organisasi pengelola zakat mendapatkan infak, sedekah dan zkat berasal dari para *muzaaki* dan para pemangku kepentingan yang ingin tahu dengan jelas kemana harta yang mereka berikan disalurkan. Jika pengelola zakat dapat

bersifat transparan, maka para pemangku kepentingan juga akan mengapresiasinya dengan memberikan kepercayaan kepada para pengelola zakat.

Sama halnya dengan organisasi nirlaba lainnya. Organisasi Forum Les Peduli yang menggunakan nilai budaya *Tri Hita Karana* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan juga perlu membuat laporan keuangan. Menurut mereka, salah satu kebutuhan organisasi yaitu memiliki nama yang baik dimata masyarakat umum. Dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lebih baik kedepannya. Forum Les Peduli tetap menjaga kepercayaan para donaturnya dengan tetap menjadi organisasi yang bersifat akuntabel. Forum Les Peduli tidak membuat laporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang telah ditetapkan. Namun, untuk menjaga kepercayaan, Forum Les Peduli membuat sebuah laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari dua cara: 1) Pihak Forum Les Peduli membuat catatan ringkasan sederhana yang berikhsikan kegiatan-kegiatan organisasi; 2) Pihak Forum Les Peduli membuat laporan pertanggungjawaban dengan mempublikasikan seluruh kegiatan mereka ke sosial media. Selain itu, Forum Les Peduli juga memberikan pertanggung jawaban dengan melalui tiga aspek penting dalam *Tri Hita Karana* yaitu: 1) Aspek *prahayangan* (pertanggungjawaban antara manusia dengan tuhan-Nya), hal ini dbuktikan dengan kepatuhan beribadah para penggerak Forum Les Peduli; 2) Aspek *pawongan* (oertanggungjawaban antara manusia dengan manusia lainnya), dengan melakukan catatan sederhana dan melakukan publikasi kegiatan di sosial media; 3) Aspek *palemahan* (pertanggungjawaban antara manusia dengan lingkungannya), hal ini dibuktikan dengan tetap memperhatikan hak-hak alam yang harus tetap diberikan akibat adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti tetap menjaga kelestarian lingkungan (Partari, Yasa, and Atmadja 2019).

### **Nilai Internasional dalam Pelaporan Keuangan**

konteks akuntansi, konvergensi merujuk pada upaya untuk menyamakan bahasa bisnis melalui harmonisasi standar akuntansi. Setiap negara memiliki lembaga pengatur standar pelaporan keuangan, seperti IAI di Indonesia, GAAP yang dirilis oleh FASB di Amerika Serikat, dan IAS yang dikeluarkan oleh IASB di Uni Eropa. Meskipun setiap negara memiliki standar pelaporan yang berbeda-beda, konvergensi bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam pelaporan keuangan di seluruh dunia. Perbedaan standar pelaporan keuangan antara negara-negara dapat menghambat para pelaku bisnis internasional dalam

mengambil keputusan bisnis. Oleh karena itu, konvergensi standar akuntansi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bisnis internasional.

Saat ini, International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB) telah menjadi standar acuan yang digunakan oleh lebih dari 100 negara di seluruh dunia. IASB adalah badan pengatur standar dari International Accounting Standards Committee Foundation, sebuah lembaga independen nirlaba internasional yang bergerak di bidang pelaporan keuangan yang berkedudukan di Inggris. IFRS sudah diwajibkan atau diperbolehkan di banyak negara di dunia dan semakin banyak negara yang beralih ke IFRS, termasuk 10 negara yang memiliki pasar modal global seperti Jepang, Inggris, Perancis, Kanada, Jerman, Hongkong, Spanyol, Switzerland, Australia, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, sejak revisi PSAK tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi standar PSAK dengan IFRS melalui konvergensi. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan melakukan konvergensi PSAK dengan IFRS melalui tiga tahap: adopsi, persiapan akhir, dan implementasi. Diharapkan bahwa konvergensi PSAK dengan IFRS akan meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan, mengurangi biaya penyusunan, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan, serta menyelaraskan dengan pengaturan yang berlaku secara internasional (Sukendar 2009).

### **Alasan dan Hambatan Proses Harmonisasi Pelaporan Keuangan Nirlaba**

Harmonisasi dalam pelaporan keuangan perlu dilakukan pada organisasi nirlaba dengan tujuan menyelaraskan bentuk serta struktur laporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Alasan mengapa perlunya dilakukan harmonisasi adalah sebagai berikut: 1) Orang yang memiliki kepentingan pada suatu perusahaan sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan perusahaan adalah cara untuk mengetahui kondisi keuangan tersebut. Melalui analisis pos-pos neraca, dapat diperoleh gambaran tentang hasil atau perkembangan perusahaan. Pada dasarnya, tujuan utama dari laporan keuangan organisasi nirlaba sama dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, karena organisasi memiliki tujuan yang berbeda, hal ini menyebabkan perbedaan dalam hal penggunaan laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan tersebut (Julianto, Affan, and Diyanti

2017); 2) Memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang memberikan sumber daya, seperti para donor, anggota, kreditur, dan pihak lain yang memberikan dukungan kepada organisasi nirlaba tanpa mengharapkan pembayaran kembali (Rahayu, Halim, and Nuha 2019); dan 3) Laporan keuangan organisasi nirlaba, termasuk catatan atas laporan keuangan, memiliki tujuan yang terperinci untuk menyajikan informasi mengenai: (Jumlah dan jenis aset, kewajiban, dan ekuitas organisasi nirlaba; dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi nilai dan jenis ekuitas organisasi nirlaba; jenis dan jumlah arus kas masuk dan keluar dari organisasi selama periode tertentu, serta hubungan antara keduanya; bagaimana organisasi nirlaba memperoleh dan mengelola kas, meminjam dan melunasi hutang, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi likuiditasnya (Hastoni, A, and Mustikawati 2015).

Proses harmonisasi dalam pelaporan keuangan nirlaba tentunya tidak selalu berjalan dengan mudah. Mengingat beberapa hambatan-hambatan yang terjadi pada organisasi nirlaba pada proses penyusunan laporan keuangan. Hambatan-hambatan tersebut juga akan mempengaruhi proses harmonisasi.

Seperti halnya pada salah satu organisasi nirlaba di bidang Pendidikan pada sebuah penelitian menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan beberapa sekolah masih belum sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang dimiliki sekolah tidak mempunyai keahlian dibidang keuangan maupun akuntansi serta masih belum memahami dengan jelas pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Dinanti and Nugraha 2018).

Kemudian, organisasi nirlaba yang menggunakan nilai budaya *Tri Hita Karana* juga terdapat beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya proses harmonisasi pelaporan keuangan nirlaba. Pasalnya pada Forum Les Peduli yang menggunakan nilai budaya *Tri Hita Karana* tersebut sengaja tidak membuat laporan keuangan dengan alasan yaitu: 1) Para relawan sepakat tidak menggunakan laporan keuangan dengan tujuan untuk menghindari pikiran negative dari masyarakat; 2) Dalam menjalankan kegiatan barang yang dibeli jenisnya sama, jikapun berbeda tidak sampai 5 jenis yang berbeda; 3) kegiatan yang mereka jalankan tidak mengeluarkan dana yang tidak sesuai dengan napa yang telah diminta dari donatur (Partari, Yasa, and Atmadja 2019).

Selain itu, masjid sebagai organisasi yang ada pada bidang keagamaan juga memiliki masalah dalam penyajian laporan keuangan, yang di mana hal

tersebut akan menjadikan hambatan untuk melakukan harmonisasi dalam pelaporan keuangan nirlaba. Masjid di kota Banda misalnya belum ada yang menerapkan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan, masalahnya adalah masjid-masjid di kota banda tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup ahli atau tidak ada yang berlatar belakang Pendidikan akuntansi. Di mana hal tersebut justru akan mempersulit dalam memahami standar akuntansi yang berlaku secara umum. Selain hal tersebut para bendahara juga memiliki waktu yang terbatas untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingganya mereka hanya menyajikan laporan keuangan secara sederhana (Nazila and Fahlevi 2019).

## **KESIMPULAN**

Beberapa hasil dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik dalam pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku dengan demikian proses harmonisasi juga akan terkendala yang mengakibatkan laporan keuangan pada beberapa organisasi nirlaba tidak sama.
2. Organisasi nirlaba dalam mempertahankan kepercayaan donaturnya, masing-masing organisasi memiliki cara tersendiri.
3. Konvergensi dalam konteks akuntansi merujuk pada upaya untuk menyamakan bahasa bisnis melalui harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Setiap negara memiliki lembaga pengatur standar pelaporan keuangan, namun perbedaan standar pelaporan antara negara-negara dapat menghambat para pelaku bisnis internasional dalam mengambil keputusan bisnis. Oleh karena itu, konvergensi standar akuntansi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bisnis internasional. Saat ini, IFRS yang dikeluarkan oleh IASB telah menjadi standar acuan yang digunakan oleh lebih dari 100 negara di seluruh dunia. IFRS diwajibkan atau diperbolehkan di banyak negara di dunia dan semakin banyak negara yang beralih ke IFRS. Di Indonesia, IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi standar PSAK dengan IFRS melalui konvergensi dalam tiga tahap: adopsi, persiapan akhir, dan implementasi. Diharapkan bahwa konvergensi PSAK dengan IFRS akan meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan, mengurangi biaya penyusunan, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan, serta menyelaraskan dengan pengaturan yang berlaku secara internasional.

4. Harmonisasi pelaporan keuangan perlu dilakukan pada organisasi nirlaba untuk menyelaraskan bentuk dan struktur laporan keuangan. Alasan perlunya dilakukan harmonisasi antara lain: memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang memberikan sumber daya, seperti para donor, anggota, kreditur, dan pihak lain yang memberikan dukungan; laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki tujuan yang terperinci untuk menyajikan informasi mengenai jumlah dan jenis aset, kewajiban, dan ekuitas organisasi nirlaba, dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi nilai dan jenis ekuitas organisasi nirlaba, serta jenis dan jumlah arus kas masuk dan keluar dari organisasi selama periode tertentu. Namun, karena organisasi memiliki tujuan yang berbeda, hal ini menyebabkan perbedaan dalam hal penggunaan laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, harmonisasi pelaporan keuangan nirlaba menghadapi beberapa hambatan, seperti perbedaan dalam standar akuntansi, masalah keuangan, dan perbedaan dalam budaya organisasi.
5. Beberapa organisasi nirlaba, seperti sekolah, organisasi dengan nilai budaya Tri Hita Karana, dan masjid, mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang keuangan dan akuntansi, serta kurangnya pemahaman tentang pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Masjid di kota Banda, misalnya, belum menerapkan PSAK 45 karena tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup ahli dan para bendahara memiliki waktu yang terbatas untuk menyusun laporan keuangan secara detail.

## REFERENSI

- Andarsari, Pipit Rosita. 2016. "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)." *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 1 (2): 143–52. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>.
- Andriani, Mahyuni, and Nurhidayati. 2021. "Analisis Praktik Pelaporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 5 (1): 75–85.
- Ardini, Yusi, and Asrori. 2020. "Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris Tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas Dan Transparansi." *Economic Education Analysis Journal* 9 (1): 133–49.

<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i1.37241>.

- Dinanti, Aldila, and Ginanjar Adi Nugraha. 2018. "Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)* 20 (1): 1–8. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1081>.
- Hastoni, Bambang A, and Dinah Sobar Mustikawati. 2015. "Analisis Penerapan PSAK 45 (Revisi 2011) Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Nirlaba." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 3 (2): 101–1010.
- Julianto, Endra, Nurita Affan, and Ferry Diyanti. 2017. "Analisis Penerapan PSAK No. 45." *Jurnal Manajemen* 9 (2): 55–61. <https://doi.org/10.29264/jmmn.v9i2.2474>.
- Kristiani, Ika, and Nika Ardian. 2022. "Kinerja Organisasi Nirlaba Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Manajemen* 10 (4): 1120–32.
- Maryono. 2020. "Harmonisasi Akuntansi Internasional: Dari Keberagaman Menuju Keseragaman." *Kajian Akuntansi* 2 (1): 77–91.
- Maulidiyah, Nikmatul, and Darno. 2019. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Donatur Di Yayasan Sosial Keagamaan." *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan* 1 (1): 1–8.
- Nazila, Siti Rahma, and Heru Fahlevi. 2019. "Analisis Penerapan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Masjid Di Kota Banda." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4 (2): 374–82. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12278>.
- Partari, Ni Made Kamani, I Nyoman Putra Yasa, and Anantawikrama Tungga Atmadja. 2019. "Menelaah Kearifan Lokal Tri Hita Karana Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Forum Les Peduli (Studi Kasus Pada Organisasi Forum Les Peduli, Desa Pekraman Les – Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 10 (2): 170–82.
- Rahayu, Desy Rustiyanti, Moh. Halim, and Gardina Aulin Nuha. 2019. "Penerapan Akuntansi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Kasus Pada Masjid Al-Baitul Amien Di Jember)." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 17 (1): 37–48.
- Sartika, Dwi. 2019. "Analisa Penyajian Laporan Keuangan Nirlaba Dengan Menggunakan Aplikasi Sango Accounting Berdasarkan PSAK 45 Pada Yayasan Pendidikan Dian Cipta Cendikia." *Seminar Nasional Ibi Darmajaya* 1: 134–42.
- Shoimah, Imro'atun, Siti Maria Wardayati, and Yosefa Sayekti. 2021. "Adaptasi

- Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus Pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo)." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21 (02): 243–59. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1388>.
- Sugiarti. 2016. "Adopsi Penuh Harmonisasi Standar Akuntansi." *Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan V* (2): 178–201.
- Sukendar, Heri. 2009. "Konvergensi Standar Laporan Keuangan Ke Standar Pelaporan Keuangan Internasional, Apa Dan Bagaimana." *Jurnal The Winners* 10 (1): 10. <https://doi.org/10.21512/tw.v10i1.712>.
- Tinungki, Angelia Novrina Meilani, and Rudy J. Pusung. 2014. "Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK N0. 45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana." *Jurnal EMBA* 2 (2): 809–19.
- Yanti, Evi Maulida, Zulfikar, Muliana, and Achma Mutacha. 2020. "Dampak Positif Dan Negatif Dalam Penerapan Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) Di Indonesia." *Jurnal Real Riset* 2 (4): 41–46.